

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia, keadaan ini sering terjadi pada Krisis ekonomi dan kurangnya modal menjadi hambatan utama dalam proses membangun sebuah usaha dalam masyarakat sehingga bisa mengakibatkan usaha tidak berjalan dengan lancar. Kebutuhan dana menjadi aspek yang sangat penting dan sangat riskan sehingga menjadi faktor utama penyebab gagalnya sebuah usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Hal ini salah satu nya diakibatkan oleh faktor ekonomi kemiskinan pada Indonesia.

Suparmono (2018) Menyatakan bahwa kemiskinan (*proverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama dinegara berkembang. Masalah kemiskinan merupakan suatu yang kompleks, baik dilihat dari penyebabnya maupun dilihat dari ukurannya. Sebuah bangsa akan mengalami keterlambatan perkembangan akibat dari kemiskinan ini.

masyarakat, khususnya pada masyarakat pedesaan sehingga masyarakat pedesaan tidak mempunyai kemampuan untuk membangun potensi dan wilayah pedesaannya sendiri meskipun sumber daya nya melimpah.

Di pedesaan, banyak pemberi modal seperti pinjaman *online*, rentenir, atau *pengijon* yang menawarkan pinjaman dengan menggunakan jaminan berupa harta benda. Bantuan modal ini hanya bersifat sementara dalam menyelesaikan masalah masyarakat, karena setelah itu masyarakat akan mendapatkan masalah baru. Pinjaman ini memiliki bunga yang sangat

tinggi dan konsekuensi keterlambatan dalam membayar cicilan yang sangat berat, sehingga pada akhirnya hal tersebut akan membuat masyarakat kesulitan dalam pelunasan dan usaha masyarakat semakin sulit untuk berkembang.

Masalah kesulitan modal usaha ini merupakan salah satu hal yang harus diatasi oleh pemerintah dan pemerintah memiliki peranan yang sangat penting didalamnya karena karena jika dibiarkan masyarakat akan semakin sulit untuk mengembangkan usaha mereka. Bentuk peran pemerintah ini ialah berupa pemberian bantuan dan bimbingan teknis serta pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Oleh karena itu, program yang menjadi agenda utama pemerintah adalah program pembangunan nasional yang telah dilakukan pemerintah dari dulu hingga saat ini.

Sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan untuk program penanggulangan kemiskinan, hadir bank konvensional seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BPR tentu memiliki tujuan yang sama dengan bank pada umumnya yakni berfungsi untuk menjalankan intermediasi atau perantara keuangan dengan mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat. Baik dalam secara kredit ataupun bentuk lainnya yang bertujuan untuk mendorong segala kegiatan usaha di lingkungan masyarakat. Yang paling utama adalah untuk disalurkan ke usaha retail dan kredit kecil.

Dalam praktiknya, di sini perbankan masuk ke dalam kategori lembaga keuangan bank. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah sebagai penghimpun

dan penyaluran dana masyarakat. Bank Perkreditan Rakyat menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 Ayat 4 dinyatakan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

PT. BPR BKK Demak (perseroda) Kabupaten Demak adalah lembaga keuangan daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu BUMD Pemerintah Kabupaten Demak. Sesuai visi dan misi, Bank BPR BKK Demak (perseroda) menjadi bagian usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui sektor pembiayaan UMKM. Bank BPR BKK Demak (perseroda) bergerak dibidang usaha jasa perbankan dengan produk utama berupa tabungan, deposito, dan kredit. Produk kredit yang ditawarkan oleh bank akan menentukan keberhasilan bank, namun setiap produk memiliki resiko yang berbeda, Bank perlu menerapkan suatu prosedur dalam mengelola kreditnya guna untuk meminimalisir resiko yang dihadapi di masa mendatang.

Produk kredit yang ditawarkan oleh PT. BPR BKK Demak (perseroda) ada berbagai macam yaitu kredit Pegawai, Kredit Mikro BKK, Kredit Modal Kerja, Kredit Musiman.

Dalam pemberian kredit kepada debitur PT. BPR BKK Demak (perseroda) selaku pemberi kredit (kreditur) benar benar menganalisa calon debitur secara intern dan ekstern agar dapat menghindari risiko yang lebih besar dikemudian hari. Calon debitur harus memenuhi persyaratan yang

telah ditetapkan oleh PT. BPR BKK Demak (perseroda) sebelum pinjaman tersebut diberikan. Prosedur atau sistem pemberian kredit sehat dan benar adalah upaya bank dalam mengurangi risiko dalam pemberian kredit, yang dimulai dengan tahapan analisa pemberian kredit yang meliputi beberapa tahap sehingga mengeluarkan keputusan kredit yang didasarkan pada hasil analisa yang dilakukan. Terdapat fenomena yang terjadi pada PT BPR BKK Demak (Perseroda) yaitu terdapat pada suku bunga yang tinggi ketimbang bank kompetitor disekitar BPR BKK tetapi kebanyakan nasabah mengajukan di PT BPR BKK Demak (perseroda) dikarenakan dalam sistem pencairannya lebih mudah serta lebih cepat yaitu sekitar 2-3 hari di BPR BKK ketimbang di kompetitor atau bank lainnya di sekitar BPR BKK.

Sehubung dengan hal tersebut di atas tertarik untuk mengangkat judul **“ANALISIS SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR BKK DEMAK (PERSERODA) KANTOR CABANG KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dikaji yaitu bagaimana analisis sistem pemberian kredit pada PT. BPR BKK Demak (perseroda) Kantor Cabang Karangawen Kabupaten Demak?

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, agar pembahasan fokus sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang, maka masalah yang dibatasi adalah

sistem pemberian kredit pada PT. BPR BKK Deemak (perseroda) Kantor Cabang Karangawen Kabupaten Demak.

#### **D. Tujuan**

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemberian kredit dan mengetahui apakah sistem pemberian kredit yang digunakan oleh PT. BPR BKK Demak (perseroda) Kantor Cabang Karangawen Kabupaten Demak sudah sesuai dengan pedoman pemberian kredit yang baik menurut ketentuan sistem pemberian kredit yang baik menurut ketentuan sistem pemberian kredit secara umum menurut Kasmir (2014).

#### **E. Manfaat**

1. Bagi Penulis
  - a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Diploma 3 pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta.
  - b. Untuk mengetahui kenyataan apa yang ada di lingkungan kemudian dibandingkan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada saat kuliah.
  - c. Untuk menambah wawasan khususnya mengenai sistem pemberian kredit.
  - d. Sebagai sarana meningkatkan kemampuan,, kreativitas, kematangan, serta menimbulkan kedewasaan diri.
2. Bagi Instansi

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pengambilan keputusan terkait sistem pemberian kredit.
  - b. Terjalannya hubungan yang saling menguntungkan antara PT. BPR BKK Demak (Perseroda) dan STIM YKPN Yogyakarta.
3. Bagi STIM YKPN
- a. Diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan laporan tugas akhir dengan topik yang serupa di masa yang akan datang.
  - b. Terjalannya hubungan kerja sama antara STIM YKPN dan PT. BPR BKK Demak (Perseroda).
  - c. Mendapatkan umpan balik untuk peningkatan kualitas pendidikan mahasiswa lulusan STIM YKPN Yogyakarta.